



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab terakhir ini, dirumuskan beberapa kesimpulan dan rekomendasi.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan, mengenai Manajemen Perawatan Sarana dan Fasilitas Pendidikan melalui Proyek Operasi Perawatan dan Fasilitas pendidikan, apabila dikaitkan dengan empat strategi pokok kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari peningkatan kesempatan dan perluasan pendidikan, peningkatan kualitas, relevansi, serta efektivitas dan efisiensi pendidikan.

Manajemen Perawatan Sarana dan Fasilitas pendidikan, harus berorientasi kepada usaha peningkatan efisiensi dan efektivitas, oleh karena itu penyelenggaraan Manajemen Perawatan Sarana dan Fasilitas pendidikan, harus memperhatikan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian/pengawasan.

Berikut ini beberapa kesimpulan pokok dari pembahasan manajemen perawatan sarana dan fasilitas pendidikan di Kabupaten Garut :

1. Manajemen perawatan sarana dan fasilitas pendidikan, melalui proyek OPF di Kabupaten Garut dilaksanakan berdasarkan Keppres No. 19 Tahun 1994, yang dijabarkan kedalam bentuk Petunjuk Operasional, yang merupakan pencerminan dari Lembar Kerja dan penjabaran DIP yang telah disahkan. Pada umumnya penggunaan dana tersebut relatif

sudah memenuhi peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam kegiatan rehabilitasi gedung sekolah, dimana pelaksana kegiatan fisik diserahkan ke pihak ketiga, melalui penunjukan langsung, ternyata dapat memberikan peluang kepada kontraktor yang ditunjuk, untuk menyerahkan tanggung jawabnya kepada sub kontraktor, sehingga rehab tersebut sering berada dibawah standar.

2. Mekanisme manajemen perawatan sarana dan fasilitas pendidikan, melalui proyek OPF di Kabupaten Garut, masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah :
 - a. Pembuatan RAPBS yang menjadi dasar perencanaan, di sekolah penerima dana , pada umumnya telah memenuhi persyaratan , akan tetapi rencana yang diajukan oleh sekolah masih terlalu kaku oleh aturan yang berlaku.
 - b. Dalam pembuatan RAPBS, tidak melibatkan unsur-unsur terkait seperti BP3, guru maupun OSIS.
 - c. Dana bantuan perawatan melalui proyek SLTP di Kabupaten Garut jumlahnya tidak sama, karena pemberian dana berdasarkan jumlah kelas yang dimiliki oleh sekolah yang bersangkutan. Dengan demikian mengakibatkan sekolah yang banyak muridnya akan lebih mampu berkembang sedangkan yang berada di pedesaan yang memiliki murid yang sedikit sulit untuk mengembangkan diri.
 - d. Kurang memadainya dana yang tersedia untuk rehab sekolah, hal ini menyulitkan untuk penentuan sekolah mana akan diprioritaskan untuk lebih dahulu mendapat rehab, karena pada umumnya memiliki skala prioritas yang relatif sama.

3. Pelaksanaan manajemen perawatan sarana dan fasilitas pendidikan melalui proyek OPF di Kabupaten Garut, menurut rencana diawali pada bulan April sampai bulan Maret tahun berikutnya, akan tetapi dana OPF biasanya baru dapat diluncurkan pada bulan Juni dan Desember, hal ini jelas akan berpengaruh terhadap jadwal rencana yang telah dibuat. Selain memerlukan dua kali tenaga, waktu, serta biaya dalam pendistribusiannya. Selain itu dalam pengorganisasian anggaran pembangunan / DIP disiapkan oleh tiga unit yaitu Bapenas, Depdikbud dan Depdagri. Sedangkan anggaran rutin yang biasanya disebut DIK disiapkan oleh Depkeu, Depdikbud dan Depdagri. Dalam prakteknya masing-masing anggaran mempunyai aturan sendiri dan tidak fleksibilitas dalam realokasi dana disamping pbadministrasian yang berbeda. Hal diatas mengakibatkan tidak adanya tanggung jawab yang jelas antar unit, tidak ada evaluasi secara regular terhadap kebutuhan real yang diperlukan, dan tidak ada jaminan bahwa dana dialokasikan berdasarkan pada azas pemerataan. Masalah lain dalam penorganisasian terletak pada pelembagaan sekolah yagn bersangkutan, dimana kepala sekolah kurang dapat mengkoordinasikan kegiatan perawatan yang mengakibatkan kekurangadanya pemilikan akan keberdadaan sekolah itu, selain tidak adanya kontrol terhadap kegiatan perawatan sarana dan fasilitas pendidikan sehingga dana yang disalurkan tidak efektif.

4. Pengawasan / Pengendalian (Controlling)

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengendalian manajemen perawatan sarana dan fasilitas pendidikan, masih terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kurang dilaksanakannya pengawasan pemimpin proyek, maupun pemimpin bagian proyek terhadap pelaksanaan perawatan sarana dan fasilitas pendidikan. Kalaupun pengawasan tersebut dilaksanakan, biasanya dititik beratkan pada keadaan fisik, dan kelengkapan administrasi saja.
- b. Pelaksanaan pengawasan / pengendalian tidak pernah dilakukan secara cross check, akibatnya terjadi peluang-peluang untuk melakukan penyelewengan (satu kegiatan dengan beberapa tanda bukti pembayaran / kwitansi untuk digunakan sebagai pertanggung jawaban terhadap sumber-dana yang berlainan).
- c. Tidak adanya pengawasan yang seksama dalam sistem penunjukan langsung untuk melaksanakan kegiatan rehab ringan, hal ini kadang dijadikan peluang bagi kontraktor yang ditunjuk untuk melemparkan tanggung jawabnya kepada sub kontraktor, sehingga akhirnya, pelaksanaan rehab tersebut sering dibawah standar.
- d. Bukti lain dari kekurang adanya pengawasan adalah dengan masih terdapatnya keterlambatan dalam melakukan peng-SPJ an kegiatan, hal ini mengakibatkan terlambatnya pendistribusian dana pada treatment berikutnya.

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Garut telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam segi kuantitatif yang menuju kearah pemerataan pendidikan. Meskipun secara umum menunjukkan adanya peningkatan APK dan APM, akan tetapi angka-angka ini belum sesuai dengan target yang diharapkan.

Menurut pengamatan, penyebab belum tercapainya target tersebut, dapat dilihat dari faktor geografis, daya tampung, tenaga kependidikan, sarana dan pra sarana, maupun faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

Dari faktor-faktor tersebut, maka faktor dana, sarana, dan prasarana pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Karena faktor-faktor penentu tersebut keberadaannya terbatas, maka perlu dimanfaatkan secara efektif dan efisien, berdasarkan keterbatasan tersebut maka perlu diberdayakan secara optimal melalui manajemen perawatan sarana dan fasilitas pendidikan.

B. REKOMENDASI.

Dalam pengelolaan perawatan sarana dan fasilitas pendidikan agar dititik beratkan kepada sekolah yang bersangkutan, melalui pemberdayaan BP 3 setempat.

1. Dalam penyusunan RAPBS agar melibatkan unsur-unsur terkait seperti BP 3, masyarakat, guru dan OSIS, sehingga mereka akan merasa terlibat dalam kepemilikan sekolah, yang pada akhirnya bersama-sama mengupayakan perawatan dan pemeliharaan bagi sekolah dimaksud.
2. Dalam pendistribusian dana OPF diupayakan tepat waktu, agar dana tersebut benar-benar efektif karena tepat menurut jadwal yang telah dibuat oleh sekolah.
3. Dalam pengawasan terhadap manajemen perawatan sarana dan fasilitas pendidikan melalui proyek OPF di Kabupaten Garut, agar benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.